

Kuartal II, Penerbitan Surat Utang Marak

Oleh Devie Kania

► JAKARTA – Penerbitan surat utang terutama obligasi korporasi bakal marak pada April-Juni 2017. Sejumlah perusahaan sedang menunggu audit laporan keuangan 2016 untuk persiapan penerbitan obligasi.

Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengatakan, jika imbal hasil (*yield*) surat utang negara (SUN) relatif stabil pada kuartal II-2017, penerbitan surat utang korporasi di Indonesia akan marak. Sebab, *yield* SUN yang stabil menyebabkan biaya dana (*cost of fund*) menjadi rendah.

“Selain itu, potensi *refinancing* utang yang terbilang cukup besar juga akan mendorong perusahaan menerbitkan obligasi. Tahun ini, obligasi yang jatuh tempo sekitar Rp 78 triliun,” ujar Handy kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (22/2).

Sementara itu, dalam risetnya, Handy menyebutkan bahwa tahun ini terdapat sisa plafon dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi sebesar Rp 146,56 triliun. Sedangkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selama 1 Januari hingga 21 Februari 2017 menunjukkan, terdapat tujuh korporasi yang mengemisi obligasi senior senilai total Rp 14,11 triliun dan satu perusahaan yang berencana menerbitkan obligasi subordinasi (*subdebt*) senilai Rp 1,6 triliun.

Dari data emisi obligasi KSEI hingga 21 Februari 2017, terlihat sudah ada delapan korporasi yang nama perusahaannya juga tercatat di dalam riset Mandiri Sekuritas perihal proyeksi emisi obligasi tahun ini. Delapan korporasi itu adalah PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dengan PUB I tahap I senilai Rp 500 miliar, PT Astra Sedaya Finance dengan PUB III tahap III Rp 2,5 triliun, dan PT Sarana Multigriya Financial (SMF) dengan PUB III tahap IV sebesar Rp 1,68 triliun.

Data KSEI juga menunjukkan, terdapat emisi obligasi dari PT BFI Finance Tbk (BFIN) untuk PUB III tahap II sebesar Rp 1 triliun. Kemudian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank dengan PUB

III tahap IV sebesar Rp 5,22 triliun, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dengan PUB II tahap III Rp 1,66 triliun, PT Toyota Astra Financial Services dengan PUB II tahap II senilai Rp 1,55 triliun, dan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) dengan emisi obligasi subordinasi sebesar Rp 1,6 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan *Investor Daily*, PT Indomobil Finance Indonesia juga segera menerbitkan obligasi melalui PUB II tahap IV senilai Rp 410 miliar. Kemudian PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) yang juga berniat mengemisi obligasi PUB baru dengan target nilai sekitar Rp 3-5 triliun pada kuartal II-2017.

Mengenai obligasi, Mandiri Sekuritas pun mencatat, total emisi obligasi baru mencapai Rp 110 triliun untuk sepanjang 2016. Dari jumlah tersebut, komposisi penerbitan antara lain, sektor perbankan sebanyak 28,5%, perusahaan *multifinance* 26,5%, institusi keuangan 21,3%, dan transportasi 5,8%.

Sisa penerbit obligasi tahun lalu adalah korporasi yang berasal dari sektor infrastruktur, telekomunikasi, migas, properti, makanan dan minuman, perdagangan ritel, dan pariwisata.

Data KSEI periode 1 Januari-21 Februari 2017 juga menunjukkan, terdapat 13 perusahaan yang akan menerbitkan surat utang jangka menengah (*medium term notes/MTN*) senilai Rp 4,01 triliun. Dari sisi nilai penerbitan, MTN masih jauh di bawah emisi obligasi. Tapi perusahaan yang memilih instrumen pendanaan tersebut jauh lebih banyak dibandingkan obligasi senior.

Menurut Handy, perusahaan mungkin lebih memilih MTN, karena proses penerbit instrumen ini jauh lebih sederhana dibandingkan obligasi. Sebab, mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengeluarkan MTN adalah *private placement*. “Tetapi harus memperhatikan waktu penerbitan maupun



Peluncuran BRILink Mobile

Wakil Direktur Utama Bank BRI Sunarso (dua dari kiri) bersama Direktur Konsumer Bank BRI Sis Apik Wijayanto (kanan), Direktur Executive Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Enny V Panggabean (dua dari kanan) serta Deputy Direktur Direktorat Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi (kiri), memencet tombol saat meluncurkan BRILink Mobile di Pasar Modern BSD, Tangerang, Rabu (22/2). BRILink Mobile adalah aplikasi mobile yang digunakan oleh agen BRILink dengan menggunakan internet sebagai jalur komunikasi transaksinya di mobile device seperti smartphone/tablet yang berbasis android.

kebutuhan perusahaan dan pertimbangan biaya dana,” ujar dia.

Sementara itu, analis *Fixed Income* PT MNC Securities I Made Adi Saputra sebelumnya mengatakan, penerbitan obligasi korporasi (*corporate bonds*) di Indonesia berpotensi marak sepanjang tahun 2017, sehingga dapat memicu kenaikan premi risiko (*risk premium*). Meski demikian, kenaikan *risk premium* untuk penerbitan semester I diproyeksi akan lebih rendah dibandingkan semester II-2017. Dia mengatakan, dengan asumsi

The Federal Reserve System (The Fed) menaikkan suku bunga acuan pada semester II atau kisaran Mei-Juni 2017, perseroan akan beramai-ramai mengemisi surat utang pada semester I ini. Sebab, biaya dana (*cost of fund*) yang perlu dikeluarkan akan lebih murah, dibandingkan penerbitan pada semester II-2017.

Soalnya, kata Made, kenaikan suku bunga acuan The Fed, dapat berdampak kepada potensi kenaikan *yield* (imbal hasil) untuk surat berharga negara (SBN) dan obligasi korporasi.

Jadi ruang kenaikan *risk premium* pada semester I akan jauh lebih rendah dibanding semester II. “Cuma berkaitan dengan waktu penerbitan yang tepat, sebetulnya juga kembali kepada pandangan masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Pasalnya, tutur dia, jatuh tempo surat hutang dan kondisi setiap perusahaan berbeda. Jika kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik, tentu tidak masalah jika ingin menambah utang pada semester I-2017. “Sebaliknya jika memberikan

tekanan terhadap keadaan keuangan, tentu penerbitan itu dapat bermasalah. Intinya, setiap perusahaan memiliki pandangan yang berbeda-beda,” papar dia.

Adapun, andaikan pada semester I perusahaan jadi marak menerbitkan surat utang, Made menilai, perusahaan tersebut akan menghadapi potensi kenaikan premi risiko (*risk premium*) kisaran 10-15 basis poin (Bps). Hal itu dilatar belakangi aksi persaingan antara perusahaan untuk menarik minat investor membeli surat hutang.

Sucorinvest Bidik Dana Kelolaan Rp 5,3 T

JAKARTA – PT Sucorinvest Asset Management mendbidik penambahan dana kelolaan (*asset under management/AUM*) senilai Rp 1 triliun menjadi Rp 5,3 triliun hingga akhir tahun ini. Peningkatan akan ditopang pembelian (*subscription*) produk eksisting dan peluncuran tiga produk reksa dana.

Saat ini, perseroan sudah mengantungi AUM senilai Rp 4,6 triliun. “Kami memperkirakan peningkatan berkisar 5,7% tahun ini, dibandingkan realisasi tahun lalu,” ujar Direktur Investasi Sucorinvest Jemmy Paul di Jakarta, Rabu (22/2).

Satu produk yang baru saja diluncurkan perseroan adalah Sucorinvest Anak Pintar, yaitu reksa dana berbasis campuran. Produk yang menasar investor institusi ini diperkirakan menyasar investor institusi ini diperkirakan terhadap total dana kelolaan tahun ini. “Kami sengaja memilih untuk menerbitkan

reksa dana campuran, karena ditawarkan untuk investor institusi. Produk ini memiliki profil tingkat pendapatan lebih stabil dan perdagangan likuid,” ujarnya.

Sucorinvest menargetkan proporsi investor institusi sekitar 80% terhadap total dana kelolaan tahun ini dan sisanya sebesar 20% berasal dari investor ritel. Kontribusi investor ritel ditargetkan naik dua kali lipat menjadi 20% terhadap total dana kelolaan tahun ini. Sucorinvest Anak Pintar memanfaatkan portofolio pada obligasi pemerintah bertenor 7-8 tahun dan tenor 3-5 tahun untuk obligasi korporasi yang memiliki peringkat AA-. Reksa dana ini juga memanfaatkan *underlying asset* saham-saham LQ45.

Sucorinvest akan mengalokasikan 1% dari dana kelolaan untuk dana pendidikan. Yayasan yang menerima adalah Pansophia Nusantara yang menaungi kurang lebih 2.000 anak

kurang mampu.

Terkait penerbitan dua reksa dana lainnya, Jemmy mengatakan, perusahaan sedang mengkajinya dengan kemungkinan produk reksa dana saham dan terproteksi dengan sasaran investor institusi. “Masih belum matang, baru rencana jadi belum ada spesifikasi. Kami masih lihat target pasarnya,” imbuhnya.

Saat ini, perusahaan mengelola sebanyak 20 produk, yaitu empat produk reksa dana saham dan satu reksa dana syariah. Adapun kontribusi terbesar berasal dari reksa dana terproteksi dengan dana yang terhimpun mencapai Rp 3 triliun.

Tahun lalu, portofolio Sucorinvest masih berkisar di sektor pertambangan yang dianggap *overweight* tahun lalu. “Sekarang banyak di saham menengah, lihat kapitalisasi pasar juga untuk pindah ke saham *bluechip* lagi,” ujarnya. (c01)

Bank BTN

Sahabat Keluarga Indonesia

www.btn.co.id

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat- 10130

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2016.

Sesuai ketentuan (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 dan Pasal 22 ayat (3) dan (4), Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“UU BUMN”) dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. 03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“PERMEN PKBL”), Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Sesuai dengan ketentuan (i) pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2017.

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 dan Pasal 22 ayat (3.c) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UU BUMN dan (iii) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL, Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

4. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (18) dan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMEN PKBL, Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada PERMEN PKBL yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat Menteri No. SR-119/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank BTN (Persero) Tbk Tahun Buku 2016. Adapun berdasarkan Pasal 19 UUPT, Pasal 26 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II tahun 2016.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220, Telp. (021) 570 9009 Fax. (021) 570 9026, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasanya pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi identitas Diri yang masih berlaku, baik yang pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

7. Bahan-bahan Rapat yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh sejak Pemanggilan sampai dengan diselenggarakannya Rapat di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, Fax. (021) 633 6719 jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan, kecuali untuk mata acara keladapan yaitu Perubahan Pengurus Perseroan baru tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Februari 2017

Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, Pukul 14.27 sampai dengan Pukul 14.43, bertempat di Financial Club, Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi; dan
2. Permohonan persetujuan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Muhamad Alfian Baharudin	Direktur Utama : Wiliarsio Utomo
	Direktur : Risma Ardhi Chandra
	Direktur : Aris Widiarto
	Direktur Independen : I Made Satyaguna

C. Rapat dipimpin oleh Bapak Muhamad Alfian Baharudin selaku Komisaris Utama.

D. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.386.563.600 saham atau mewakili 81,115% dari 4.175.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

H. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat telah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

I. Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan memutuskan:

1. Untuk mata acara Rapat pertama:

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Muhamad Alfian Baharudin	Direktur Utama : Wiliarsio Utomo
Komisaris : Aris Widiarto	Direktur : Risma Ardhi Chandra
Komisaris : Iwan Supriadi	Direktur : Eko Kusumawijaya
Independen	Direktur Independen : I Made Satyaguna

2. Untuk mata acara Rapat kedua:

Menyetujui permohonan persetujuan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Jakarta, 23 Februari 2017

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Direksi

HINDARI SUSPENSISAHAM

BEI Wajibkan Emiten Gelar Mini Ekspos

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan kesempatan pada emiten yang memiliki pergerakan harga saham tidak biasa untuk menggelar mini ekspos. Emiten yang bersedia melaksanakan mini ekspos tidak akan terkena suspensi perdagangan saham.

Bandingkan dengan pedoman pengawasan perdagangan bursa saat ini atas saham yang mengalami pergerakan tidak biasa akan otomatis terkena *unusual market activity* (UMA) dari BEI. Apabila saham tersebut masih bergerak tidak wajar setelah terkena UMA, saham tersebut akan terkena suspensisasi siklus.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia Hamdi Hasyarbaini mengatakan, pilihan mini ekspos tersebut akan dimasukkan dalam pedoman pengawasan perdagangan saham di bursa yang baru. “Kami sedang mengkajinya pedoman baru tersebut,” jelas dia di Jakarta, Rabu (22/2).

Menurut dia, bursa tidak akan melakukan suspensi siklus terhadap saham yang bergerak tidak biasa, apabila emiten tersebut telah menggelar mini ekspos dengan tujuan memberikan penjelasan secara lengkap. Namun apabila emiten menolak menggelar mini ekspos, sahamnya akan terkena suspensi siklus. “Jadi investor sudah aware dengan segala risikonya,” terang Hamdi.

BEI, menurut dia, tidak perlu mendiskusikan rencana penambahan poin dalam pengawasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, mekanisme tersebut bukan bagian dari

peraturan, tetapi pedoman pengawasan perdagangan.

Selain akan menambah opsi pengawasan perdagangan, BEI menargetkan mengaplikasikan peraturan baru tentang *preclosing* perdagangan pada semester I tahun ini. Bursa menyiapkan dua alternatif yang bakal diterapkan secara bertahap untuk *preclosing* perdagangan bursa.

Mekanisme pertama, BEI akan menggunakan sistem, sehingga informasi perdagangan yang terjadi saat *preclosing* dapat diketahui investor lain. “Jadi pihak yang melakukan *marking the close* berfikir dua kali, karena apabila dia ingin menurunkan harga saham, ada pihak lain yang akan melawan,” tutur Hamdi.

Alternatif kedua adalah dengan membuat random closing dalam 10 menit terakhir perdagangan saham, sehingga investor tidak tahu waktu penutupan dengan pasti. Menurut Hamdi, sebelum *preclosing*, investor atau broker sering melakukan *marking the close*. Dengan bertransaksi satu lot, pihak tersebut bisa mempengaruhi harga naik atau turun.

Hanya saja, menurut dia, dalam beberapa waktu belakangan terlihat indikasi penurunan investor yang melakukan *marking the close*. Dalam dua hingga tiga bulan ini, saat-saat terakhir perdagangan saham, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat sebelum *preclosing*, tiba-tiba melemah setelah *preclosing*.

Menurut Hamdi, investor bermodal besar yang dapat melakukan *marking the close*, karena perilaku tersebut membutuhkan modal besar. (fik)